

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk tindak pidana perjudian menjadi perjudian online yang memiliki karakteristik lebih kompleks, terstruktur, dan melibatkan jaringan kejahatan terorganisir. Dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan penerapan dasar hukum terhadap pelaku perjudian online, yaitu penggunaan ketentuan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik struktur organisasi dan modus operandi pelaku perjudian online terorganisir serta menganalisis penerapan pidana umum dibandingkan dengan pidana khusus berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan menggambarkan perjudian online sebagai kejahatan terorganisir yang memiliki struktur hierarkis, pembagian tugas yang sistematis, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam operasionalnya. Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr yang menerapkan Pasal 303 KUHP dinilai belum mampu mengakomodasi karakteristik kejahatan siber sehingga mengabaikan keberlakuan UU ITE sebagai hukum pidana khusus. Sebaliknya, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr telah menerapkan ketentuan UU ITE secara lebih tepat sehingga memberikan kepastian hukum dan mencerminkan penegakan hukum yang lebih progresif terhadap kejahatan perjudian online terorganisir. Oleh karena itu, penerapan UU ITE sebagai *lex specialis* perlu diprioritaskan dalam penanganan tindak pidana perjudian online guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pemidanaan.

Kata Kunci: perjudian online, kejahatan terorganisir, KUHP, UU ITE, *lex specialis derogat legi generali*, pemidanaan.

ABSTRACT

*The advancement of information technology has transformed conventional gambling into online gambling, which is characterized by more complex, structured, and organized criminal activities. In practice, inconsistencies remain in the application of criminal law to online gambling offenders, particularly between the provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law). These inconsistencies have resulted in sentencing disparities and legal uncertainty. This study aims to analyze the organizational structure and modus operandi of organized online gambling networks and to examine the application of general criminal law in comparison with special criminal law based on the principle of *lex specialis derogat legi generali* and the objectives of criminal punishment. This research employed a normative juridical method using statutory and case approaches. The study relied on primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively through library research focusing on Decision Number 1308/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr and Decision Number 491/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr of the North Jakarta District Court. The findings indicate that both decisions reveal online gambling as a form of organized crime characterized by a hierarchical organizational structure, systematic division of roles, and extensive use of information technology. Decision Number 1308/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, which applied Article 303 of the Indonesian Criminal Code, was considered inadequate in addressing the cybercrime dimension of the offense because it overlooked the application of the ITE Law as a special criminal statute. In contrast, Decision Number 491/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr appropriately applied the provisions of the ITE Law, thereby providing greater legal certainty and reflecting a more progressive approach to law enforcement against organized online gambling. Accordingly, the application of the ITE Law as *lex specialis* should be prioritized in prosecuting online gambling offenses to ensure legal certainty, justice, and effective criminal sanctions.*

Keywords: *online gambling, organized crime, Indonesian Criminal Code, ITE Law, *lex specialis derogat legi generali*, criminal sanctions.*